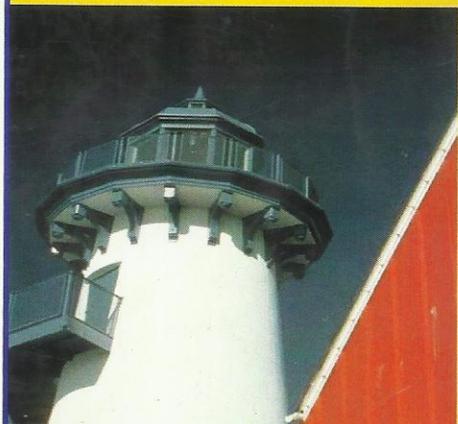
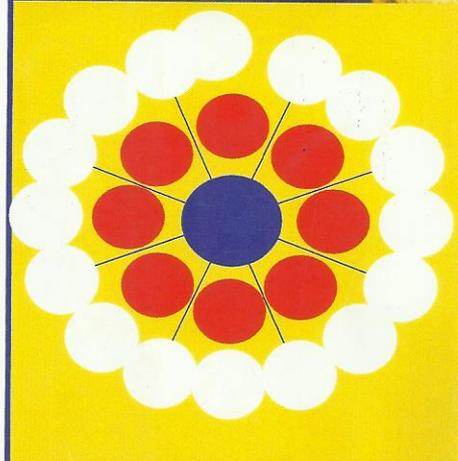
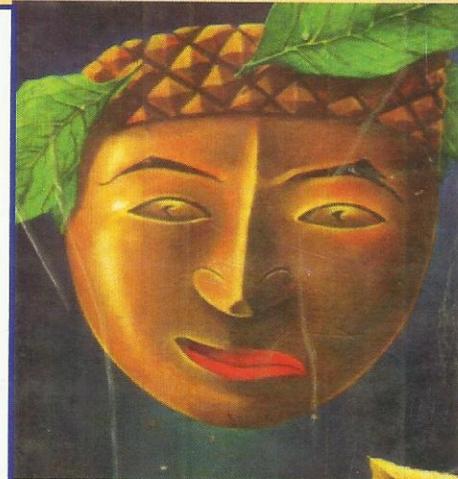


Ibnu Khaldum

Analisis Pengaruh Pengembangan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pamona Selatan Di Poso Sulawesi Tengah (*Aris Silamba*), Analisis Sistem Antrian Berbasis Multimedia Pada Pengambilan Gaji Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (*Anita Puspita Dewi*), Hubungan Kepemimpinan Demokratis Dan Kinerja Pegawai Dengan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (*Evarianty Djanko*), Penataan Organisasi Perangkat Pemerintah Kecamatan Di Kantor Camat Tapa Kabupaten Bone Bolango (*Ferdi S. Gani*), Analisis Benefit Can Cost Terhadap Pelayanan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur (*Djafar*), Pengaruh Pelatihan Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PDAM Kota Makassar (*Machmud Djunaidy*), Gender Dalam Keluarga, Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus pada Keluarga di Desa Rumat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara) (*Godefridus Samderubun*), Analisis Pendapatan Usahatani Sawit Pola Plasma Dan Inti (Studi Di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Utara) (*Megawati Hafidz*), Sistem Penyimpanan Arsip Pada Sub. Bagian Administrasi Dan Umum Kantor Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan". (*Aisyah dan Numiraj*), Kaitan Good Governance Dalam Aktivitas Ekonomi Kapitalis Di Era Globalisasi (*Ibrahim Ahmad*), Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Kendari (Studi Kasus : Brylian Plaza, Rabam, & Mall Mandonga) (*Irwani Lakawa*), Analisis Pengelolaan Anggaran Terhadap Penjualan Tiket Pada Kantor Pemasaran Tiket Dewi Sartika (*A. Himalaya*), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Perum Perumnas Regional VII Makassar) (*Hj. Salmiaty Taty*), Pengaruh Kredit Konsumtif PT. Bank Sul-Sel Cabang Sidrap Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pns Di Kabupaten Sidrap. (*Verri Ginoga*), Perbedaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Sapi Perah Di Propinsi Sulawesi Selatan (*Sitti Nurani Sirajuddin, Hermanto Siregar, Bambang Juanda, Arya Hadi Dharmawan*), Hubungan Pendidikan Formal Perempuan Dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (*Imelda J Loppies*), Implementasi Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Di Kabupaten Jayawijaya (*Telly Nancy Silooy*), Dampak Industri Kecil Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Perubahan Perilaku Di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa (*Husain Jusuf*), Efektifitas Hubungan Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Menjalankan Kerjasama Kemitraan Di Kabupaten Poso (*Alif Y. Walenta*), Implementasi Program Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa (*Alimuddin Said*), Sikap Jurnalis Terhadap *Citizen Journalism* (*Hemansyah*), Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Bagi Peserta Diklat Petugas Sosial Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. (*Ronawaty Anasiru*), Wanita Di Sektor Informal, Studi Kasus Wanita Pedagang Kue Tradisional Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (*Rahmat Hidayat*), Islam Dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Tolaki (Jejak Antropologis Upacara Siklus Hidup Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (*Anas*), Intervensi Politik Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Rekrutmen dan Promosi Pegawai) (*Nuryanti Mustari*), Pengaruh Program Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pemulung Di TPA Mancani Kota Palopo (*Pasoni Mustafa Muhani*), Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Pelabuhan Larea-Larea Kabupaten Sinjai (*Abdul Karim*), Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Kolaka (*Elisabeth Lobo*), Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dari Korupsi, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).(*Nurmin*), Optimalisasi Kinerja Dosen Dalam Pembelajaran Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Makassar (*Kasmawati*)



KANTOR
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IX SULAWESI

Volume VI
Edisi ke-2 Juli 2011

**SUSUNAN PENGURUS JURNAL ILMIAH "IBNU KHALDUM"
KOPERTIS WILAYAH IX SULAWESI**

- Pelindung** : Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, SH, MH
(Koordinator Kopertis Wil IX Sulawesi)
- Pengarah** : Drs. H.A. Djamro Remmang
(Sekretaris Pelaksanaan Kopertis
Wil. IX Sulawesi)
- Penanggung Jawab** : Dr. Syahrir Mallongi, M.Si
- Dewan Penyunting Ahli** :
1. Prof. Dr. Abu Hamid
2. Prof. Dr. Tahir Kasnawi
3. Prof. Dr. Rabihatun Idris Arif
4. Prof. Dr. Idrus Abustam
5. Prof. Nursadik, MA., Ph. D
6. Dr. Dwia Ariestina NK., MA
- Pemimpin Umum** : Dr. Syamsir Torang
Redaksi Pelaksana :
1. Dr. Syamsir Torang
2. Dr. Siardin A. Djemma, M.Si
3. Dr. Agussalim Munada, M.Si
4. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si
5. Dr. Hamid
- Tata Usaha** :
1. Andi Makmur, SH
2. David Hamid
3. Dra. Hj. Nuraeni Daud
4. Syahrudin K, SE

DAFTAR ISI

Analisis Pengaruh Pengembangan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pamona Selatan Di Poso Sulawesi Tengah	1
Aris Silamba	
Analisis Sistem Antrian Berbasis Multimedia Pada Pengambilan Gaji Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara	7
Anita Puspita Dewi	
Hubungan Kepemimpinan Demokratis Dan Kinerja Pegawai Dengan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	19
Evarianty Djangko	
Penataan Organisasi Perangkat Pemerintah Kecamatan Di Kantor Camat Tapa Kabupaten Bone Bolango	27
Ferdi S. Gani	
Analisis Benefit Dan Cost Terhadap Pelayanan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur....	34
Djafar	
Pengaruh Pelatihan Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PDAM Kota Makassar	38
Machmud Djunaidy	
Gender Dalam Keluarga, Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus pada Keluarga di Desa Rumat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara)	43
Godefridus Samderubun	
Analisis Pendapatan Usahatani Sawit Pola Plasma Dan Inti (Studi Di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Utara)	50
Megawati Hafidz	
Sistem Penyimpanan Arsip Pada Sub. Bagian Administrasi Dan Umum Kantor Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan"	57
Aisyah dan Nurmira	
Kaitan Good Governance Dalam Aktivitas Ekonomi Kapitalis Di Era Globalisasi	63
Ibrahim Ahmad	
Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Kendari (Studi Kasus : Brylian Plaza, Rabam, & Mall Mandonga)	70
Irwan Lakawa	
Analisis Pengelolaan Anggaran Terhadap Penjualan Tiket Pada Kantor Pemasaran Tiket Dewi Sartika	79
A. Himalaya	
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Perum Perumnas Regional VII Makassar)	87
Hj. Salmiaty Taty	

Pengaruh Kredit Konsumtif PT. Bank Sul-Sel Cabang Sidrap Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pns Di Kabupaten Sidrap. Verri Ginoga	97
Perbedaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Sapi Perah Di Propinsi Sulawesi Selatan Sitti Nurani Sirajuddin, Hermanto Siregar, Bambang Juanda, Arya Hadi Dharmawan	106
Hubungan Pendidikan Formal Perempuan Dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Imelda J Loppies	113
Implementasi Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Di Kabupaten Jayawijaya Telly Nancy Silooy	121
Dampak Industri Kecil Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Perubahan Perilaku Di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Husain Jusuf	127
Efektifitas Hubungan Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Menjalankan Kerjasama Kemitraan Di Kabupaten Poso Alif Y. Walenta	134
Implementasi Program Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa Alimuddin Said	157
Sikap Jurnalis Terhadap <i>Citizen Journalism</i> Hermansyah	166
Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Bagi Peserta Diklat Petugas Sosial Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. Ronawaty Anasiru	172
Wanita Di Sektor Informal, Studi Kasus Wanita Pedagang Kue Tradisional Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Rahmat Hidayat	179
Islam Dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Tolaki (Jejak Antropologis Upacara Siklus Hidup Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Anas	185
Intervensi Politik Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Rekrutmen dan Promosi Pegawai) Nuryanti Mustari	191
Pengaruh Program Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pemulung Di TPA Mancani Kota Palopo Pasoni Mustafa Muhani	199
Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Pelabuhan Larea-Larea Kabupaten Sinjai Abdul Karim	204

Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Kolaka	214
Elisabeth Lobo	
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	221
La Ode Asrun Azis R.	
Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).....	227
Nurmin	

PERBEDAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT USAHA SAPI PERAH DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

Sitti Nurani Sirajuddin¹⁾ Hermanto Siregar, Bambang Juanda, Arya Hadi Dharmawan²⁾

Abstract

The research was aimed to differences in local-related activities business dairy of partnership in Sinjai and the independent systems in Enrekang. Research was conducted in October 2010 until December 2010 with descriptive method. The results of the research, indicated the government policy Sinjai district business partnership that is the system of dairy production areas, institutional areas, marketing and production while local government policies on dairy business independent systems is veterenary training centers, strengthening institutional, artificial insemination, improvement service quality and control of disease, promotion of eating dangke

¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan UNHAS

²⁾ Staf Pengajar Institut Pertanian Bogor

PENDAHULUAN

Problem utama sub sektor peternakan saat ini adalah ketidakmampuan secara optimal menyediakan produk-produk peternakan, seperti daging, telur dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan protein hewani. Hal ini kemungkinan disebabkan peningkatan produktivitas ternak tidak mampu mengimbangi laju permintaan masyarakat akan produk peternakan yang semakin tinggi. Disamping itu pembangunan sub sektor peternakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian, harus dilaksanakan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan produksi ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat peternak dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu mendorong peternak agar tetap mampu bersaing baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional (Saragih, 2000)

Oleh karena itu salah satu kebijakan produksi susu dalam negeri ini adalah desentralisasi pengembangan sapi perah. Sejak awal pengembangan sapi perah di Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa saja yang merupakan kawasan terpadat relatif sulit untuk meningkatkan populasi sapi perah sehingga pendekatan yang dapat dilakukan adalah mendorong pengembangan peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa dan seiring semangat desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, maka

pengembangan sapi perah mulai diarahkan ke Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Bali dengan membentuk sentra-sentra baru yang cocok untuk pengembangan komoditi ini. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah berdasarkan kondisi agroklimat wilayah yang optimal untuk pertumbuhan dan produksi sapi perah, ketersediaan lahan untuk mendukung pengembangannya dan ketersediaan pasar dan juga dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan hewani terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan permintaan akan produk-produk hasil ternak. Termasuk salah satu komoditi penting yakni susu sebagai salah satu produksi sapi perah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sendana, Kabupaten Enrekang dan Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai pada bulan September 2010 hingga bulan Desember 2010. Metode yang digunakan dengan deskriptif dan data diperoleh dari instansi yang terkait.

Usaha Sapi Perah Sistem Kemitraan

Sistem kemitraan sapi perah diharapkan akan mengurangi resiko, baik resiko produksi maupun resiko *supply chain*

melalui jaminan yang menyakinkan terhadap sumber persediaan dengan persyaratan kualitas khusus dan waktu tertentu kepada pengolah hasil (koperasi) maupun pedagang perantara. Tujuan utama sistem kemitraan adalah untuk menghindari kemungkinan kerugian yang lebih besar dari resiko susu segar yang mudah busuk juga untuk menangkal resiko yang datang dari terjadinya fluktuasi harga, mencegah terjadinya *moral hazard* dan kemungkinan kesalahan dalam menseleksi resiko serta pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia.

Potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Sinjai Barat antara lain adalah :

- a. Letak geografis Kecamatan Sinjai Barat yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng pada ketinggian diatas 900 m dpl, menghasilkan suatu iklim dan lingkungan (suhu yang dingin dengan kelembaban udara cukup tinggi) yang sesuai dengan kebutuhan hidup sapi perah.
- b. Sumber daya alam pendukung, terutama ketersediaan dan kesesuaian lahan dengan hijauan pakan ternak yang dibutuhkan oleh sapi.
- c. Aksesibilitas lokasi yang sangat strategis, yakni berada pada jalur jalan propinsi yang menghubungkan Makassar-Gowa-Sinjai, yang merupakan jalur alternatif menuju Sulawesi Selatan bagian Tenggara
- d. Ketersediaan SDM yang telah memperoleh kesempatan magang di berbagai pusat pengembangan sapi perah di pulau Jawa. SDM tersebut meliputi beberapa orang petugas dengan keahlian dari aspek budidaya sampai pada penanaman susu dan pengolahan, serta petani peternak yang magang dalam bidang budidaya dan penanganan susu.

Dengan potensi yang ada maka sistem kemitraan usaha sapi perah perlu ditelaah guna mengetahui upaya-upaya yang dilakukan peternak sapi perah dalam menjaga eksistensi usahanya. Pada dasarnya peternak melakukan kontrak untuk pemenuhan modal atau jaminan input usaha ternaknya dan kepastian pasar yang semuanya merupakan upaya peternak untuk mengurangi resiko kegagalan usaha dan pendapatan. Dalam sistem kemitraan peternak sapi perah mempunyai akses terhadap input domestik bukan merupakan persoalan bagi peternak yaitu lahan, pengadaan bibit serta input tradable yang meliputi obat-obatan dan peralatan produksi susu.

Sistem kemitraan yang berkembang pada usaha sapi perah di lokasi penelitian yaitu sistem inti plasma. Hubungan kemitraan ini diatur dalam kesepakatan perjanjian yang memuat secara jelas hak dan kewajiban plasma. Dalam sistem ini posisi inti tidak sama dengan plasma, dimana pihak inti hanya memberikan bantuan satu sapi perah betina berumur 2 – 3 tahun dan biaya pembuatan kandang serta wajib memberikan petunjuk teknis dalam mengembangkan usaha sapi perah sementara pihak plasma mempunyai kewajiban mengembalikan dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun dengan menyerahkan 2 (dua) ekor anak sapi perah, umur \pm 10 hari jenis kelamin betina/jantan dan jika telah melunasi maka sapi yang dipelihara menjadi miliknya. Semua kesepakatan ini tercantum jelas dalam perjanjian dan untuk mendapatkan bantuan sapi perah tersebut maka harus dalam satu (1) kelompok tani ternak.

Untuk mencapai tujuan dari system kemitraan usaha sapi perah maka perlu diperhatikan hak dan kewajiban pelaku kemitraan, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 1.
Hak dan Kewajiban Peternak Sapi Perah Sistem Kemitraan

HAK	KEWAJIBAN
a. Adanya jaminan ketersediaan sapronak secara kredit	a. Melaksanakan budidaya sapi perah sesuai bimbingan dari pihak inti
b. Mendapat bimbingan teknis budidaya sapi perah	b. Membayar kredit secara angsuran termasuk bibit sapi perah
c. Jaminan pemasaran dari pihak inti	c. Menyerahkan hasil produksi sapi perah
d. Menerima pembayaran hasil susu segar	

Sumber : Sirajuddin, N.S (2010)

Tabel 2.
Hak dan Kewajiban Pihak Inti Sistem Kemitraan

HAK	KEWAJIBAN
a. Menerima hasil produksi sapi perah	a. Memberikan biaya pembuatan kandang
b. Jaminan susu segar sesuai standar yang ditetapkan	b. Memberikan kredit modal usaha sapronak berupa bibit, pakan dan obat-obatan/vaksin
c. Pembayaran kredit dari peternak	c. Melakukan pembinaan dalam kegiatan budidaya sapi perah
	d. Membeli kembali hasil produksi dengan harga kontrak

Sumber : Sirajuddin, N.S (2010)

Tabel 1 menunjukkan beberapa hak dan kewajiban peternak sapi perah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih sering gagal antara lain pembayaran hasil susu segar tidak langsung diberikan kepada peternak sehingga kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit juga sering tidak dilakukan bahkan sebagai anggota koperasi modal yang harus diberikan kepada koperasi sebagai anggota juga tidak dilakukan hal ini disebabkan manajemen koperasi pada usaha sapi perah sistem kemitraan belum profesional disebabkan pengurusnya dipilih bukan oleh anggota koperasi tetapi ditunjuk oleh Dinas Peternakan setempat. Hasil ini sesuai yang dikemukakan oleh Yusdja dan Siregar (1997) dalam Sirajuddin (2010) bahwa pembentukan

koperasi sapi perah bersifat komando dan tidak sesuai dengan azas koperasi yang berakar dari bawah. Konsekuensi dari kenyataan ini adalah bahwa koperasi melaksanakan fungsinya dengan sistem komando terhadap anggota-anggota koperasi. Sifat komando itu dimulai dari cara memilih anggota yang ditetapkan koperasi yang dikaitkan dengan kredit sapi perah. Pada sisi peternak peternak, mereka pada umumnya adalah masyarakat perdesaan yang berpendidikan rendah pula sehingga menjadi anggota koperasi adalah suatu kesempatan yang sangat berharga sekalipun harus mematuhi apa yang diterapkan oleh koperasi. Sementara hak dan kewajiban pihak inti dalam hal ini adalah Dinas

Peternakan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel 2.

Berkaitan dengan pelanggaran perjanjian oleh peternak diberikan sanksi oleh pihak inti dalam hal ini adalah Dinas Peternakan antara lain jika terjadi kematian ternak karena kelalaian peternak maka wajib melunasi kewajibannya dan masih banyak kewajiban yang perlu dilakukan oleh pihak plasma dan jika terjadi perselisihan pihak peternak dan pihak dari Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai maka sebaiknya dilakukan secara musyawarah, dengan hal tersebut maka peternak sering dalam melakukan usaha sapi perah bertindak setengah hati akibat sanksi yang tidak tegas.

Oleh karena usaha sapi perah sistem kemitraan belum memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sehingga belum ada Peraturan Daerah yang mengatur sistem usaha tersebut. Adapun peraturan daerah yang berkaitan dengan peternakan adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelarangan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif dan Lalu Lintas Ternak Antar Daerah.

Pengembangan komoditi sapi perah di Kabupaten Sinjai merupakan sebagai salah satu unggulan komoditi Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Propinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan populasi dan produksi susu serta pengolahannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan susu masyarakat Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah dilakukan antara lain:

1. Bidang Produksi

Populasi sapi perah di wilayah inkubator Kabupaten Sinjai juga terus dikembangkan. Terdapat perbedaan jumlah dengan keadaan akhir tahun 2008 disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya induk sapi baru (pengadaan tahun 2006) dan anak yang dilahirkan mengalami kematian akibat pemulihan kondisi setelah pengangkutan yang kurang baik, umur kebuntingan yang tua saat pengangkutan

dan suplai pakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan sapi.

Dalam rangka perbaikan produktifitas induk, telah dilakukan upaya pembinaan dan pemenuhan tenaga teknis antara lain inseminator, penyuluh, tim medis (dokter hewan) dan tenaga teknis yang bekerja langsung pada industri pengolahan susu. Tenaga teknis penyuluh lapangan, tim medis dan inseminator merupakan subsidi pemerintah dengan anggaran yang berasal dari Pokja Gerbang Emas Propinsi Sulawesi Selatan (1 dokter hewan dan inseminator) dan dari Pokja Gerbang Emas Sapi Perah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Peternakan Sinjai.

Perkembangan produksi susu terutama yang dapat diolah di pabrik menunjukkan peningkatan. Saat ini produksi susu mencapai 400 liter perhari untuk pemasaran di kabupaten Sinjai dan Makassar. Perbaikan yang telah dilakukan sejak tahun 2007 terutama pada sistem penyeteroran susu. Untuk menjaga kualitas susu, dan efektifitas penerimaan telah dibentuk 5 unit TPS (tempat penyeteroran susu) yang berlokasi pada tempat paling strategis yang dapat dijangkau kendaraan di tiap kelompok tani.

Operasionalisasi pabrik pengolahan susu pasteurisasi telah berjalan efektif, yakni dengan menggunakan mesin pasteurisasi berkapasitas 200 liter per proses (jam). Demikian pula dengan mesin packing yang terdiri atas mesin packing gelas otomatis 2 line dengan kecepatan pengisian yang mencapai 30 – 50 kap per menit, dan mesin packing tipe vertical untuk kemasan saset 500 ml. Keberadaan mesin pasteurisasi didukung dengan mesin Packing baik untuk susu saset (mesin pengemas vertical) maupun mesin packing gelas (cup). Mesin packing saset merupakan pengadaan tahun 2003/2004, penyempurnaan line sistem dilakukan tahun 2006 sehingga untuk pengemasan susu langsung dapat dilakukan dari mesin pasteurisasi.

Pengembangan konversi energi Gas Bio. Sejak tahun 2006 telah dilakukan pembangunan sludger pengolah limbah feses sapi untuk menghasilkan Gas Bio. Sejak Bulan Februari 2007, 3 unit sludger telah berfungsi dengan baik, dan telah dipergunakan oleh masyarakat untuk

kebutuhan memasak di dapur. Ketiga unit tersebut mempunyai volume total 100 m³ yang mampu menghasilkan gas yang sangat besar. Akan tetapi pada saat dilakukan penelitian, gas bio tersebut tidak berfungsi lagi.

2. Bidang Kelembagaan

Pengembangan kegiatan bidang kelembagaan antara lain adalah pengembangan kelompok tani. Sampai akhir tahun 2006 telah terbentuk sebanyak 3 kelompok sapi perah di Kabupaten Sinjai. Pada tahun 2007 telah dibentuk 2 kelompok baru sehingga telah terbentuk sebanyak 5 kelompok sampai saat ini, antara lain : Kelompok Tani Batu Leppa (Gunung Perak), KT Tamba Lahulung (Gunung Perak), KT Bunga Siria (Balakia), KT Patiroang (Barania) dan KT Kariango (Gunung Perak) akan tetapi saat ini kelompok-kelompok ternak tersebut kurang aktif.

Pembinaan kerjasama telah dilakukan antara lain dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), JICA, dan berbagai instansi terkait seperti Balai Persusuan di Malang, Koperasi Sae Batu Malang, Dinas Koperasi dan lain.lain. Hasil kerjasama tersebut antara lain permodalan koperasi dari Dinas Koperasi, Iprtekda LIPI (nilai Rp 100.000.000,-), kerjasama pelatihan dan magang. Disamping itu sedang dirintis kerjasama dengan JICA dalam rangka pengembangan populasi dan perbaikan pakan.

3. Pemasaran Dan Produksi

Telah dilakukan upaya pengembangan pemasaran dan promosi antara lain dengan mengembangkan pemasaran di Kota Makassar dan sekitarnya. Sampai akhir tahun 2006 hanya ada tiga Loper di Makassar. Akan tetapi saat dilakukan penelitian hanya satu agen saja. Untuk mengembangkan pemasaran telah dilakukan promosi besar-besaran antara lain oleh Pemkab Sinjai, dengan mengadakan lomba minum susu di Mall GTC, Makassar. Saat ini sedang dilakukan promosi melalui kendaraan Pemkab, dengan stiker besar berisi tentang ajakan minum susu, dan mempromosikan SUSIN (susu segar pasteurisasi Sinjai).

Telah dilakukan pendaftaran merk SUSIN untuk produk susu pasteurisasi dan SANSHU untuk es krim oleh Pemerintah

Kabupaten Sinjai ke Departemen Hukum dan HAM. Hal ini untuk mendapatkan legalitas merk, sehingga tidak lagi dipakai oleh perusahaan lain.

Dari pemaparan-pemaparan di bidang produksi, kelembagaan serta pemasaran dan produksi terlihat bahwa sistem kemitraan usaha sapi perah di Kabupaten Sinjai lebih cenderung kepada langkah-langkah persiapan oleh pemerintah daerah menuju terciptanya peternak yang siap untuk bermitra. Langkah-langkah persiapan tersebut antara lain mencakup berbagai bantuan dan program dengan tujuan agar para peternak sapi perah lebih bersungguh-sungguh mengembangkan usaha ternaknya.

Usaha Sapi Perah Sistem Mandiri

Usaha sapi perah yang dikembangkan di Kabupaten Enrekang berpusat di kecamatan Cendana dimana populasi sapi perahnya yang meningkat maka produksi susunya mengalami peningkatan. Untuk produksi susu di Kabupten Enrekang perhari memproduksi 8 sampai 15 liter. Produksi susu tergantung dari manajemen pemeliharaan dan pakan yang diberikan. Tingginya produksi sapi perah di Kabupaten Enrekang juga didukung oleh limbah pertanian seperti daun ubi jalar, daun kacang tanah dan daun jagung, hal ini sesuai dengan pendapat Eka(2008) dalam Irmayani (2010) yang menyatakan bahwa daun ubi jalar berpengaruh nyata dapat meningkatkan produksi susu sapi perah di Kabupaten Enrekang.

Semua peternak di Kabupaten Enrekang mengolah hasil budidaya sapi perahnya yaitu susu menjadi makanan khas masyarakat Enrekang yakni dangke (semacam keju makanan khas Enrekang) yang harganya makanan tersebut biasanya Rp. 10.000, sebagai catatan 1 dangke volumenya berkisar antara 1,5 liter – 2,0 liter (Anonim, 2009).

Usaha sapi perah di Kabupaten Enrekang masih bersifat usaha sampingan. Masyarakat memiliki pekerjaan pokok sebagai petani dan ada juga sebagai pegawai negeri sipil. Sistem pemeliharaan sapi perah di Kabupaten Enrekang dilakukan oleh keluarga atau pemilik ternak sendiri tanpa menggunakan tenaga kerja. Dimulai dari pembersihan kandang dilakukan oleh

pemilik ternak pada pagi hari dan sore karena pada umumnya anak-anak mereka bersekolah. Pengambilan pakan dilakukan pada pagi dan sore hari, untuk pakan yang akan diberikan pada ternak pagi hari diambil di sore hari. Pemerahan dilakukan oleh pemilik ternak pada pagi dan sore hari, selanjutnya proses pembuatan dangke pada umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga pada pagi dan sore hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Muljana (2005) yang menyatakan bahwa pemeliharaan sapi perah harus dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk pemasaran dangke sendiri sekarang ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dangke yang diproduksi tidak dapat menutupi permintaan. Dibuktikan dengan pengakuan peternak yang menyatakan bahwa dangke yang mereka buat biasanya dibeli langsung di rumah peternak dan setiap harinya ada konsumen yang tidak mendapatkan dangke karena terlambat. Salah satu peternak di Kabupaten Enrekang yang populasinya terbesar yaitu sekitar 35 ekor, dimana mampu menghasilkan dangke 45 biji per hari yang bila dikalkulasikan dalam Rupiah sekitar Rp. 15.000.000 perbulan. Hal ini sesuai dengan pendapat Eka (2008) dalam Irmayani (2010) yang menyatakan bahwa dangke yang diproduksi di Kabupaten Enrekang memiliki permintaan yang tinggi. Juga sejalan yang dinyatakan dalam Anonim (2009) bahwa produksi dangke yang ada di Kabupaten Enrekang hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar 15 % dari permintaan konsumen.

Oleh karena usaha sapi perah sangat prospektif dikembangkan di Kabupaten Enrekang untuk memenuhi permintaan dangke yang masih jauh lebih tinggi dari produksi saat ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menerapkan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pengelolaan Pusat Pelatihan Peternakan

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia utamanya peternak sapi perah adalah tidak mungkin saat ini dilakukan dengan pendidikan langsung akan tetapi dengan mengembangkan pelatihan-pelatihan. Untuk itu dalam pelaksanaan

program pembangunan peternakan di Kabupaten Enrekang masih terdapat berbagai masalah karena masih sebagai usaha sampingan dan belum menerapkan teknologi maju sehingga diperlukan adanya standar kualitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen sehingga dengan kegiatan tersebut peternak akan meningkat pengetahuan dan ketrampilannya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini peran kelompok ternak sangat aktif dimana setiap kelompok ternak usaha sapi perah yang ada di Kabupaten Enrekang mengikuti kegiatan tersebut dengan dana dari kelompok tersebut secara swadaya.

2. Penguatan Kelembagaan

Pembangunan ekonomi peternakan di perdesaan diperlukan dukungan pemerintah dalam segi kebijakan pembiayaan, utamanya pada aspek kelembagaan maupun perundang-undangan serta menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha peternakan sapi perah dan menciptakan lembaga pembiayaan yang kuat dan sehat. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, terencana dan komprehensif maka pelaku usaha peternakan sapi perah akan sulit memperoleh kemudahan akses pada sumber-sumber pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas usaha.

Kebutuhan modal bagi masyarakat perdesaan utamanya bagi peternak sapi perah sangatlah penting artinya guna melangsungkan usaha yang berkelanjutan jadi usaha sapi perah memerlukan modal dalam pengembangannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang melalui BRI Cabang Enrekang memberikan kredit bagi peternak sapi perah dengan syarat dan bunga yang ringan.

Sementara koperasi juga dikembangkan di Kabupaten Enrekang yang berusaha dalam menyediakan sarana produksi usaha sapi perah sementara usaha pemasaran dangke belum dilakukan hal ini disebabkan produksi belum dapat memenuhi permintaan masyarakat. Dalam kepengurusan koperasi tersebut seluruh kegiatannya dilakukan oleh anggota koperasi sesuai dengan azas koperasi sehingga manajemen koperasi dikelola secara profesional.

3. Inseminasi Buatan

Masalah inseminasi buatan sering dikeluhkan oleh peternak sapi perah di Kabupaten Enrekang karena tingginya pengulangan IB dan sering tidak berhasilnya inseminasi buatan. Usaha sapi perah dapat berhasil jika populasi sapi laktasi semakin meningkat, oleh karena itu Dinas Peternakan Kabupaten Enrekang aktif dalam melakukan inseminasi secara rutin dan juga melaksanakan pengadaan semen beku. Perbaikan layanan dan produktifitas IB perlu terus ditingkatkan untuk memperbaiki efisiensi reproduksi dan meningkatkan populasi. Program yang diperlukan adalah peningkatan keterampilan inseminator mandiri dan program penggunaan straw dengan sperma sexing berkelamin betina. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelahiran betina sehingga dapat diperoleh pengganti induk berkualitas.

4. Perbaikan kualitas layanan dan pengendalian penyakit

Perbaikan layanan kesehatan bagi ternak terutama sapi perah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penanganan kasus-kasus penyakit yang bersifat insidental dan kasus kematian anak sapi yang masih cukup tinggi di Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu dokter hewan atau paramedis yang ditugaskan khusus di sentra pengembangan sapi perah secara rutin melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan bagi sapi perah di Kabupaten Enrekang yang juga didukung oleh Pemerintah Daerah.

5. Promosi Makan Dangke

Proses pembuatan dangke adalah merupakan kekayaan budaya dan teknologi lokal yang perlu dilestarikan. Budaya ini masih merupakan ciri khas dari masyarakat di wilayah Kabupaten Enrekang. Jika budaya makan dangke dikembangkan ke wilayah Sulawesi Selatan maka peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi dangke dapat dilakukan melalui pengembangan usaha sapi perah. Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mempromosikan budaya makan dangke telah melakukan kegiatan makan bersama di lapangan olahraga Kabupaten Enrekang bahkan tercatat dalam Guinness Book Of Record yang mencatat jumlah terbanyak makan dangke dan makanan khas Enrekang lainnya.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengembangkan usaha sapi perah sistem mandiri yaitu bidang penanganan penyakit dan IB, produksi, penguatan kelembagaan dan promosi hasil sapi perah sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai kebijakan dalam mengembangkan usaha sapi perah sistem kemitraan yaitu di bidang produksi, kelembagaan dan promosi.

Saran

Sebaiknya dalam menerapkan kebijakan pada usaha sapi perah baik sistem kemitraan maupun sistem mandiri perlu keterkaitan program dengan dinas yang terkait di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Konsorsium Sapi Perah. Model Peternakan Sapi Perah Rakyat Dengan Produksi Susu Di Atas Rataan (>12 Liter/ekor/hari). Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Departemen Pertanian.
- Irmayani. 2010. Strategi Pengembangan Usaha Sapi Perah di Kabupaten Enrekang. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mulyana. 2004. Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral. Tesis. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Sirajuddin, N. S. 2010. Analisis Biaya Transaksi Pada Usaha Sapi Perah Sistem Kemitraan dan Mandiri Serta Strategi Pengembangannya di Propinsi Sulawesi Selatan. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.